

EKSISTENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI SEKOLAH UMUM

Abdullah Muhammad^{1a)}

¹⁾ Institut Parahikma Indonesia

^{a)}E-mail: abdullahmuhammadabu@gmail.com

Abstract

This The objectives of this study are to: (1) examine the history of development (PAI) in public schools (2) examine the curriculum (PAI) in public schools (3) barriers and solutions (PAI) in public schools. Based on the results of the study and analysis, this study concludes as follows: (1) history (PAI) during the Dutch administration was discriminatory against (PAI) as stated in the Constitution of the Dutch East Indies (Indische Staatsregeling) article 179 (2) religious education is prohibited from being taught in schools government property, and may only be given outside school hours. The Teacher Ordonantie (Guru Ordonantie) of 1905, the contents of which required written permission for every religious teacher who would teach. Furthermore, during the Japanese government (PAI) it was allowed to be broadcast in government-owned schools. (2) The curriculum (PAI) in schools consists of several aspects, namely, aspects of the Qur'an Hadith, Faith or Aqidah, Morals, Fiqh (Islamic Law), and aspects of Date (History). Islamic education basically aims to deliver students to have a stable faith and spiritual depth. (3) The obstacles to Islamic Religious Education are; Lack of parental support, PAI is not in demand, PAI curriculum is too broad, Religious lessons are not useful for material, Lack of example from teachers, Lack of habituation from schools, Appearance of religious teachers is less attractive Global Culture, spiritualism against materialism, PAI is not integrated in the system. Solutions (PAI), namely: Modeling-Imitating: presenting good behavior that is practiced in the school environment, principals, teachers, parents as examples and models for students. PAI material is not limited to mere abstract material, but students get direct practical evidence in everyday life, Reflecting: A purposeful approach, students are able to get a reflection or input with what they have learned, Problem Solving: an approach by involving students from every PAI learning, Deep Discussion: PAI learning approach that guides each student in in-depth discussion, analysis, critical of understanding Islamic teachings., Socialization: PAI learning approach as an implementation process experienced by how a teaching or value (PAI), Authentic Assasment : PAI learning approach with continuous and continuous assessment and evaluation of the students.

Keywords: Curriculum, Islamic Religious, Students, Education

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk: (1) mengkaji sejarah perkembangan (PAI) di sekolah umum (2) mengkaji kurikulum (PAI) di sekolah umum (3) hambatan dan solusi (PAI) di sekolah umum. Berdasarkan hasil kajian dan analisis maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: (1) sejarah (PAI) pada masa pemerintahan Belanda mengalami diskriminatif terhadap (PAI) seperti tertuang dalam Konstitusi Hindia Belanda (*Indische Staatsregeling*) pasal 179 (2) pendidikan agama dilarang diajarkan di sekolah umum milik pemerintah, dan hanya boleh diberikan di luar jam sekolah. Ordonansi Guru (*Guru Ordonantie*) tahun 1905 yang isinya mengharuskan adanya izin tertulis bagi setiap guru agama yang akan mengajar. Selanjutnya pada masa pemerintahan Jepang (PAI) di ijin untuk diajarkan di sekolah milik pemerintah. (2) Kurikulum (PAI) di sekolah terdiri dari beberapa aspek yaitu, aspek al-Qur'an Hadits, Keimanan atau Aqidah, Akhlak, Fiqh (Hukum Islam), dan aspek Tarikh (Sejarah). Pendidikan Islam pada dasarnya bertujuan untuk mengantarkan peserta didik agar memiliki kemandirian akidah dan kedalaman spiritual. (3) hambatan Pendidikan Agama Islam yaitu; Kurangnya dukungan orang tua murid, PAI kurang diminati, Kurikulum PAI terlalu luas, Pelajaran agama kurang berguna bagi material, Kurang Peneladanan dari guru, Kurangnya Pembiasaan dari sekolah, Penampilan guru agama kurang menarik Budaya Global, spiritualisme melawan materilisme, PAI tidak menyatu dalam sistem. Solusi (PAI) yaitu: *Modeling-Imitating*: menghadirkan perilaku yang baik dipraktikkan di lingkungan sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua sebagai contoh dan model dimana bagi peserta didik. Materi PAI tidak sebatas materi belaka yang sifatnya abstrak, tetapi peserta didik mendapat pembuktian secara praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari, *Reflecting*: Pendekatan yang bertujuan, peserta didik mampu mendapatkan sebuah pantulan atau masukan dengan apa yang telah dipelajarinya, *Problem Solving*: pendekatan dengan melibatkan peserta didik dari setiap pembelajaran PAI, *Deep Discussion*: pendekatan pembelajaran PAI yang menuntun masing-masing peserta didik berdiskusi secara mendalam, analisis, kritis terhadap pemahaman ajaran Islam., *Socialization*: pendekatan pembelajaran PAI sebagai suatu proses implementasi yang dialami bagaimana sebuah ajaran atau nilai (PAI), *Authentic Assessment*: pendekatan pembelajaran PAI dengan penilaian dan evaluasi yang terus menerus berkesinambungan dan berkelanjutan terhadap anak didiknya.

Kata kunci: Kurikulum, Pendidikan Agama Islam, Peserta Didik

PENDAHULUAN

Pendidikan -kata ini diletakan kepada Islam telah didefinisikan secara berbeda-beda oleh berbagai kalangan, yang banyak dipengaruhi pandangan dunia namun pada dasarnya, semua pandangan yang berbeda itu, kemudian bertemu dalam kesimpulan awal yaitu pendidikan merupakan suatu proses

penyiapan generasi untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien.¹

Pendidikan tidak sekedar mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu, yakni mentransfer nilai. Selain itu juga merupakan kerja budaya yang menuntut peserta didik untuk selalu mengembangkan potensi dan daya kreatifitas yang dimilikinya agar tetap bertahan hidup.

Salah satu ciri khas manusia adalah kemampuannya dalam menididik dan dididik melalui aktivitas pendidikan, dalam masyarakat unsur pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan. Pendidikan adalah aktivitas dari kebudayaan dan merupakan aktivitas pembudayaan, di sisi lain kebudayaan menjelmakan aktivitas, sistem dan struktur pendidikan. Oleh karena itu, baik masyarakat tradisional maupun moderen selalu mengandung unsur pendidikan yang berusaha memperkenalkan dan membawa masyarakat ke arah kebudayaannya. Pendidikan menjadi suatu instrumen untuk mentransmisikan kebudayaan pada masyarakat dan generasi baru. selain itu pendidikan juga bersifat mengawetkan kebudayaan, sehingga dapat membuat anak-anak menjadi manusia yang berbudaya.²

Pendidikan yang terbaik merupakan pendidikan yang unggul dan bermutu. Untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tidak mudah seperti membalik telapak tangan, akan tetapi ada proses dan langkah-langkah yang harus ditempuh sehingga pelaksanaan pendidikan berhasil dan memiliki mutu yang baik.³ Mutu pendidikan yang baik maka tentu akan di topang dengan kurikulum yang baik, karena kurikulum merupakan ruh utama dalam mencapai pendidikan yang bermutu.

Pendidikan yang baik dan bermutu itu bukan hanya mencerdaskan peserta didik dari sisi intelektual saja, tetapi mengkombinasikan antara ketiga kecerdasan yaitu: kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Dalam pembentukan peserta didik agar memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual maka tentunya harus diwadahi dengan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ada tiga yaitu, sekolah, madrasah dan pasantren. Hanya pasantren yang berakar dari tradisi asli (*indigenous*) Nusantara. Sedangkan sekolah dan madrasah muncul dan lahir dari hasil interaksi pihak luar. Sekolah dikenal setelah adanya interaksi

¹ Azyumardi Azrah, Pendidikan Islam : Tradisi dan Moderenisasi di Tengah Tantangan Melenium III (Cet. I; Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2012), h. 4.

² Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 88.

³ Jerry H. Makawimbang, Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan (Cet. I; Bandung : Alfabeta, 20011). h .1.

bangsa Indonesia dengan penjajah. Sedangkan madrasah lahir sebagai respon umat Islam di Indonesia, atas gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah. Sekaligus sebagai *counter institution* terhadap sekolah yang didirikan penjajah.⁴

Pada pesantren dan madrasah, keberadaan materi PAI (Pendidikan Agama Islam) tidak menimbulkan persoalan, karena sejak awal kedua lembaga ini didirikan sebagai wadah penyebaran dan pengembangan Islam. Tidak demikian halnya dengan di sekolah umum, khususnya di sekolah negeri.⁵ Di lembaga “warisan” penjajah ini, keberadaan mata pelajaran PAI mengalami perjalanan panjang dan berliku yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang mengiringi.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

Sebagai “warisan” kaum penjajah, sekolah mulai berdiri di Indonesia pada masa VOC (*Vereenigle Oost Indishe Compagnie*).⁶ Tahun 1607 VOC mendirikan sekolah yang pertama kali di Ambon, lalu dilanjutkan di Batavia (Jakarta) tahun 1617. Tujuan utama pendirian sekolah tersebut adalah untuk menenyapkan agama Katolik yang telah disebarkan sebelumnya oleh Portugis dengan menyebarkan agama Protestan, *calvinisme*.⁷ Setelah VOC diambil alih oleh Hindia Belanda (1816), pendirian sekolah semakin meluas.

Penyebaran agama Kristen merupakan salah satu misi yang dibawa Belanda ke Indonesia. Karena itu, tidak heran jika selama berkuasa di Indonesia, Belanda banyak membuat kebijakan diskriminatif terhadap umat Islam. Misalnya, dengan alasan netral dalam urusan agama sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Hindia Belanda (*Indische Staatsregeling*) pasal 179 (2) pendidikan agama dilarang diajarkan di sekolah umum milik pemerintah, dan hanya boleh diberikan di luar jam sekolah. Sedangkan di sekolah-sekolah partikular (swasta), Belanda mengizinkan pendidikan agama sebagai tambahan dengan syarat murid bisa bisa tidak mengikutinya apabila orang

⁴ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta : Logos, 2001), h.8.

⁵ Sedangkan di sekolah-sekolah swasta, khususnya yang dikelola Ormas Islam atau yayasan Islam, keberadaan PAI tidak ada persoalan, kendati tidak seeluasa di pesantren dan madrasah. Karena pendirian sekolah-sekolah tersebut sebagai bagian dari upaya penyebaran Islam.

⁶ VOC, komisi dagang Belanda (Belanda swasta), mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1602 menggantikan Portugis dan Spanyol yang telah sekitar satu abad sebelumnya (sejak awal abad 16) berada ke Indonesia (khususnya di Maluku). Baca lebih lanjut dalam : Wasty Soemanto dan F.X. Soeyarno, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia* (Surabaya : Usaha Nasional, 1983), h. 34-37

⁷ S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Nasional* (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), h. 4-5

tua murid melarang untuk ikut.⁸ Dalam praktik, kebijakan Belanda tidak benar-benar netral. Pemerintah Belanda lebih berpihak pada agama Kristen, baik dalam hal bantuan dana maupun lainnya. Sekolah-sekolah Kristen didirikan di setiap karesidenan dan dianggap sebagai sekolah pemerintah serta mendapat subsidi rutin. Dakwah Islam di daerah animisme dilarang sedangkan misi Kristen dibiarkan. Pemerintah Belanda juga membiarkan upaya penghinaan terhadap Islam, dan melarang hal yang sama terhadap Kristen.⁹

Bukti lain tindakan diskriminatif Belanda terhadap umat Islam adalah lahirnya Ordonansi Guru (Guru *Ordonantie*) tahun 1905 yang isinya mengharuskan adanya izin tertulis bagi setiap guru agama yang akan mengajar. Ordonansi 1905 ini kemudian diganti dengan Ordonansi Guru tahun 1925, yang isinya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Dalam aturan ini guru agama hanya diwajibkan untuk memberitahu sebelum mengajar, bukan meminta izin, tetapi ditentukan sanksi bila melanggar. Pada tahun 1932 keluar lagi peraturan yang dikenal dengan Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*), yang isinya menyatakan bahwa pemerintah Belanda berwenang memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak berizin atau memberikan pelajaran yang tidak disukai pemerintah.¹⁰

Dengan kebijakan-kebijakan diskriminatif di atas, dapat dipastikan betapa umat Islam menghadapi kesulitan dalam menyebarkan agamanya melalui lembaga pendidikan. Sikap dan respon umat Islam dalam menghadapi kebijakan diskriminatif tersebut dilakukan secara beragam, yang oleh Maksun dikelompokkan ke dalam dua corak; *defensif dan ofensif*.¹¹ Corak defensif dilakukan oleh sejumlah ulama tradisional (khususnya di Jawa) dengan cara menghindar ke daerah-daerah terpencil yang jauh dari pantauan Belanda dan mendirikan pesantren di sana. Dengan cara ini para ulama lebih leluasa membina generasi muda dengan ajaran Islam yang memadai sekaligus mempersiapkan mereka menjadi kader-kader tangguh yang siap berjihad melawan penjajah.¹² Sedangkan cara ofensif dilakukan sejumlah tokoh umat Islam, yang dipelopori kalangan reformis, dengan cara mendirikan lembaga-lembaga pendidikan model Belanda dengan berbasis

⁸ Lihat Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2001), h. 49.

⁹ Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta : LP3ES, 1988), h. 333; Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional ; Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi* (Yogyakarta : Kurnia Kalam, 2005), h. 17.

¹⁰ Rahim. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 50-51 ; Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*, h. 41

¹¹ Maksun, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, h. 116-117.

¹² Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta : Paramadina, 1997), h. 3-4.

Islam sebagai *counter institution* terhadap sekolah-sekolah Belanda yang berbau Kristen. Melalui corak ofensif ini, maka lahirlah lembaga-lembaga pendidikan Islam modern seperti; Madrasah Adabiyah (1909), Sekolah Adabiyah (1915), Madrasah Diniyah Zainudin Labay (1916), dan Sumatera Thawalib (1919). Dalam perkembangan berikutnya, pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam modern dilakukan secara massif oleh umat Islam di berbagai penjuru tanah air.¹³

Setelah penjajahan Belanda berakhir (1602-1942), ganti Jepang berkuasa. Agak berbeda dengan pemerintah Belanda yang cenderung keras terhadap umat Islam, kebijakan pemerintah Jepang lebih lunak dan bahkan berupaya merangkul umat Islam. Terbukti, pendidikan agama boleh diajarkan di sekolah negeri. Selain itu, kantor urusan agama yang telah berdiri di masa Belanda diganti dengan nama Shumubu, dan pemimpinnya dipercayakan kepada tokoh umat Islam (KH. Hasyim Asy'ari), pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan. Sejumlah organisasi kemasyarakatan juga diizinkan berdiri seperti PETA (Pembela Tanah Air), Hizbullah, dan MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), dan mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta (di bawah pimpinan KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakar, dan Bung Hatta).¹⁴

Longgarnya kebijakan pemerintah Jepang terhadap umat Islam tidak berarti Jepang lebih baik dibanding Belanda. Kebijakan tersebut diambil sebagai strategi Jepang untuk mengambil hati umat Islam agar memberi dukungan terhadap Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Di samping itu, kesediaan Jepang memberi izin pendirian sejumlah organisasi umat Islam dimaksudkan agar Jepang lebih mudah melakukan kontrol terhadap aktivitas umat Islam.¹⁵

Pada umumnya era Orde Lama dipilah menjadi tiga babakan sejarah; awal kemerdekaan (1945-1950), masa demokrasi liberal (1950- 1959), dan masa demokrasi terpimpin (1959-1965). Periodisasi ini menunjukkan bahwa selama masa Orde Lama, kondisi sosial politik tidak stabil. Ketidakstabilan situasi ini juga berdampak langsung pada perjalanan pendidikan bangsa, termasuk keberadaan pendidikan agama di sekolah umum.

Setelah Indonesia merdeka, segera dilakukan upaya-upaya pembaharuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, dalam rangka menata kualitas SDM yang telah lama tercabik-cabik kaum penjajah. BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) dalam sidangnya tanggal 29 Desember 1945 membuat sejumlah rekomendasi kepada Kementerian

¹³ Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta : Hidakarya Agung, 1996).

¹⁴ Assegaf, Politik Pendidikan Nasional, hlm. 115.

¹⁵ Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), h.152.

Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, yang intinya agar selekas mungkin mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran yang dijalankan sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan dan pengajaran baru.

Rekomendasi itu juga disinggung tentang keberadaan PAI di sekolah umum, yakni: "Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur seksama, hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Tentang cara melakukan ini baiklah Kementerian mengadakan perundingan dengan Badan Pekerja. Sebagai respon atas rekomendasi BP KNIP tersebut, tanggal 1 Maret 1946 Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (Dr. Mr.T.S.G Mulia) melalui Surat Keputusan Nomor 104/Bhg.O membentuk sebuah komisi khusus dengan nama Panitia Penyelidik Pengajaran yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan Soegarda Poerbakawatja, dengan tugas; (a) Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macam sekolah; (b) Menetapkan bahan pengajaran dengan mempertimbangkan keperluan yang praktis dan jangan terlalu berat; dan (c) Menyiapkan rencana pelajaran untuk tiap jenis sekolah termasuk fakultas.

Dalam laporan yang disusun tanggal 2 Juli 1946, Panitia Penyelidik berhasil merumuskan sejumlah hal penting. Rumusan tujuan pendidikan nasional diarahkan kepada upaya menanamkan *semangat dan jiwa patriotisme*.¹⁶ Tujuan ini sangat terkait dengan kondisi bangsa Indonesia yang baru saja merdeka, sehingga diperlukan upaya penanaman semangat patriotisme dan peningkatan kesadaran nasional dalam rangka mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Tentang pendidikan agama, Panitia Penyelidik merekomendasikan hal-hal berikut; (a) Pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah, (b) Para guru dibayar oleh pemerintah, (c) Pada Sekolah Dasar, pendidikan agama diberikan mulai kelas IV, (d) Pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu, (e) Para guru agama diangkat oleh Departemen Agama, Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum, f) Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama, (h) Diadakan latihan bagi para guru agama, (i) Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki, dan (j) Pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan.¹⁷

Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa PAI di sekolah umum, kendati telah diperhatikan, masih sangat terbatas. Hanya sekali dalam

¹⁶ Ary H. Gunawan, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia (Jakarta : Bina Aksara, 1986), h. 32-34.

¹⁷ Karel A. Steenbrink, Pesantren Sekolah dan Madrasah; Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen (Jakarta : LP3ES, 1994), h.. 90-91 ; Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia, h. 52-53.

seminggu, dan dimulai dari kelas empat. Tentang materi PAI yang akan diajarkan kepada siswa, sempat terjadi polemik antara kelompok Islam dan nasionalis, meskipun akhirnya diputuskan secara bulat. Misalnya, Ki Hajar Dewantara (Menteri PP dan K pertama) hanya menyepakati jika pendidikan agama sebatas sebagai pendidikan budi pekerti, dan tidak setuju dengan pendidikan agama sebagai pengajaran fiqh secara umum dalam agama Islam. Demikian pula Poerbakawatja, tokoh Taman Siswa, menolak pendidikan agama di sekolah umum, kecuali dalam lingkungan yang seluruhnya bernafaskan keagamaan dalam lingkungan keluarga, asrama, pesantren atau dalam lingkungan yang amat khusus.¹⁸ Untuk mengurus masalah-masalah agama, termasuk urusan pendidikan agama.

B. Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

Kurikulum merupakan ruh utama dalam pengembangan pendidikan oleh karena itu, kurikulum mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan, bahkan bisa dikatakan bahwa kurikulum memegang kedudukan dan kunci dalam pendidikan, hal ini berkaitan dengan penentuan arah, isi, dan proses pendidikan, yang pada akhirnya menentukan macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan. Kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah terdiri dari beberapa aspek yaitu, aspek al-Qur'an Hadits, Keimanan atau Aqidah, Akhlak, Fiqh (Hukum Islam), dan aspek Tarikh (Sejarah). Pendidikan Islam pada dasarnya bertujuan untuk mengantarkan peserta didik agar memiliki kemantapan akidah dan kedalaman spiritual.

Dasar kurikulum Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu komponen pendidikan yang sangat berperan dalam mengantarkan pada tujuan pendidikan yang diharapkan, harus mempunyai dasar-dasar yang merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum, susunan dan organisasi kurikulum Menurut Al-Syaibani menawarkan dasar-dasar kurikulum sebagai berikut:¹⁹

1. Dasar Agama, tujuan dan kurikulumnya pada dasar agama Islam dengan segala aspeknya. Dasar agama ini dalam kurikulum pendidikan Islam jelas harus berdasarkan pada al- Qur'an, al-Sunnah dan sumber-sumber yang bersifat furu' lainnya.
2. Dasar Falsafah, dasar ini memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis, sehingga tujuan, isi dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran, baik ditinjau dari sisi ontology, epistemologi, maupun aksiologi.

¹⁸ Steenbrink, *Pesantren Sekolah dan Madrasah*, h. 90

¹⁹ Lihat, al-Syaibani dalam jurnal *el Hikmah* 1979, h. 484.

3. Dasar Psikologi, dasar ini memberikan landasan dan perumusan bahwa dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik, sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya.

Sementara itu Herman H. Horne memberikan dasar bagi penyusunan kurikulum dengan tiga macam, yaitu:²⁰

- 1) Dasar Psikologis, yang digunakan untuk memenuhi dan mengetahui kemampuan yang diperoleh dari pelajar dan kebutuhan anak didik (*the ability and needs of children*).
- 2) Dasar Sosiologis, yang digunakan untuk mengetahui tuntutan yang sah dari masyarakat (*the legitimate demands of society*)
- 3) Dasar Filosofis, yang digunakan untuk mengetahui keadaan alam semesta tempat kita hidup (*the kind of universe in which we live*).

Dasar sosial ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya. Baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai ideal, cara berfikir dan adat kebiasaan, seni dan sebagainya. Kaitannya dengan kurikulum pendidikan Islam sudah tentu kurikulum ini harus mengakar terhadap masyarakat dan perubahan dan perkembangannya.

Implementasi Kurikulum PAI di sekolah umum dan Penerapan kurikulum Pendidikan Agama Islam, memiliki sifat kebergantungan yang sangat tinggi, ia sangat dipengaruhi oleh fasilitas serta potensi yang tersedia di sekolah, lingkungan, masyarakat, serta lingkungan pergaulan para siswa, latar belakang keluarga, dipengaruhi pula oleh bagaimana persepsi guru yang bersangkutan terhadap kurikulum ²¹

Dalam kerangka penerapan kurikulum PAI pada sekolah umum, para guru agama diperlukan mampu membaca “visi” sebuah kurikulum, yakni ide-ide pokok yang terkandung di dalam tujuan-tujuan kurikulum. Ide pokok tersebut dibentuk dari filsafat, teori serta kebijakan-kebijakan formal yang melandasinya. Di samping kemampuan mereka dalam menganalisis struktur kurikulumnya, guru juga harus mampu membaca visi kurikulum PAI, terutama agar persepsi yang dibentuk dalam pemikiran guru agama itu terdapat relevansi dengan visi kurikulum yang secara prinsip terkandung dalam tujuan-tujuan kurikulumnya.

Pemahaman yang relevan terhadap kurikulum mata pelajaran PAI, penting sekali bagi para guru Agama Islam, sebab selanjutnya akan dijadikan

²⁰ Lihat Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia. 2004)h. 131.

²¹ Abdul Malik, dkk. Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 176.

pedoman bagi mereka, dalam sistem pengembangan atau penerapan kurikulumnya secara sistemik dan sistematis. Pendidikan Agama Islam diharapkan dapat menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, taqwa dan akhlak, serta aktif membangun peradaban keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat.

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan bentuk nyata pelaksanaan Kurikulum PAI dalam kelas yang melibatkan unsur-unsur personal kepala sekolah dan guru, siswa, sumber belajar serta sarana dan prasarana keberhasilan suatu pelaksanaan.

Proses pembelajaran Kurikulum Pendidikan Agama Islam sebagai rencana yang memiliki komponen-komponen yang terdiri dari: tujuan, materi pelajaran, proses atau metode serta penilaian.

Adapun faktor-faktor pendukung implementasi kurikulum PAI sebagai berikut:

1. Faktor Guru

Guru merupakan salah satu unsur kependidikan yang berperan aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tutunan masyarakat yang semakin berkembang. Karena itu guru tidak semata-mata sebagai *transfer of values*, melainkan juga sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun peserta didik dalam belajar. Faktor guru cukup berperan dalam implementasi kurikulum dan berakibat langsung pada perubahan sekolah sebagai suatu sistem sosial.

Guru adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Para pakar menyatakan bahwa, betapa bagusnya sebuah kurikulum hasilnya sangat bergantung pada apa yang dilakukan guru di dalam ataupun diluar kelas. Kualitas pembelajaran yang sesuai dengan rambu-rambu PAI dipengaruhi pula oleh sikap guru yang kreatif untuk memilih dan melaksanakan.

Berbagai pendekatan dan model pembelajaran. Karena profesi guru menuntut sifat kreatif dan kemauan mengadakan improvisasi. Oleh karena itu guru harus menumbuhkan dan mengembangkan sikap kreatifnya dalam mengelola pembelajaran dengan memilih dan menetapkan berbagai pendekatan, metode, media pembelajaran yang relevan dengan kondisi peserta didik dan pencapaian kompetensi, karena guru harus menyadari secara pasti belumlah ditemukan suatu pendekatan tunggal yang berhasil menangani semua peserta didik untuk mencapai berbagai tujuan.

Keberhasilan Pendidikan Agama Islam dapat dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Sebagaimana dikutip oleh Abdul Majid dalam bukunya J.

Mars Curriculum Proses in the Primary School mengemukakan bahwa ada 5 unsur yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan pembelajaran disekolah, yaitu:

- (a) Dukungan dari kepala sekolah
- (b) Dukungan dari teman sejawat atau sesama guru
- (c) Dukungan dari peserta didik sebagai peserta didik
- (d) Dukungan dari orang tua atau masyarakat
- (e) Dukungan atau dorongan guru sebagai pendidik

Dari kelima unsur di atas yang paling menentukan berhasil tidaknya suatu proses pembelajaran adalah faktor guru. Posisi dan peran guru dalam pendidikan merupakan ujung tombak dalam menentukan berhasil tidaknya suatu rancangan program pembelajaran.

Guru dalam proses pembelajaran memegang peran yang sangat penting. Dalam proses pembelajaran guru bukanlah hanya berperan sebagai model atau teladan bagi peserta didik yang diajarnya, akan tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran (*manager of learning*) dengan demikian, efektivitas proses pembelajaran terletak di pundak guru. Oleh karenanya keberhasilan suatu proses pembelajaran ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru.

Menurut Dunkin, ada sejumlah aspek yang dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran di lihat dari faktor guru yaitu:

- 1) *Teacher formatif experience*, meliputi jenis kelamin serta semua pengalaman hidup guru yang menjadi latar belakang sosial mereka meliputi tempat asal kelahiran guru, suku, latar belakang budaya dan adat istiadat, keadaan keluarga dimana guru itu berasal, apakah berasal dari keluarga yang tergolong mampu atau tidak.
- 2) *Teacher training experience*, meliputi pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan aktivitas dan latar belakang pendidikan guru, misalnya pengalaman latihan profesional, tingkatan pendidikan pengalaman jabatan dan lain sebagainya.
- 3) *Teacher properties*, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat yang dimiliki guru. Misalnya sikap guru terhadap profesinya, sikap guru terhadap siswa, kemampuan atau intelegensi guru, motivasi dan kemampuan dalam pengelolaan dalam pembelajaran termasuk di dalamnya kemampuan dalam merencanakan dan evaluasi pembelajaran maupun kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran.

2. Faktor Siswa

Peserta didik adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan anak adalah seluruh aspek

kepribadiannya, akan tetapi tempo dan irama perkembangan masing-masing anak pada setiap aspek tidak selalu sama. Seperti halnya guru, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran dilihat aspek peserta didik meliputi aspek latar belakang peserta didik (*pupil formative experience*) serta faktor sifat yang dimiliki peserta didik (*pupil properties*).

Aspek latar belakang meliputi jenis kelamin, tempat kelahiran dan tempat tinggal siswa, tingkat sosial ekonomi siswa, dari keluarga yang bagaimana peserta didik berasal dan lain sebagainya. Sedangkan dilihat dari sifat yang dimiliki peserta didik meliputi kemampuan dasar, pengetahuan dan sikap. Sikap dan penampilan peserta didik di dalam kelas, juga merupakan aspek lain yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Adakalanya ditemukan peserta didik yang sangat aktif (*hyperkinetik*) dan ada pula peserta didik yang pendiam, tidak sedikit juga peserta didik yang memiliki motivasi yang rendah dalam belajar. Semua itu akan mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas. Sebab, bagaimanapun faktor peserta didik dan guru merupakan faktor yang sangat menentukan dalam interaksi pembelajaran.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pendidikan Agama Islam memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, ia dipengaruhi oleh fasilitas, kondisi sekolah, keluarga, peserta didik serta bagaimana persepsi guru terhadap kurikulum. Departemen Agama mengemukakan ciri-ciri peserta didik dan permasalahan yang dihadapinya pada sekolah umum, kemampuan peserta didik heterogen, waktu jam pelajaran yang terbatas, minat peserta didik besar pada mata pelajaran lain, dan sarana PAI yang terbatas.

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah sesuatu secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran misalnya, jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil dan lain sebagainya. Kelengkapan sarana dan prasarana akan membantu guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, dengan demikian sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Beberapa keuntungan bagi sekolah yang memiliki kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu: a) kelengkapan dapat menumbuhkan gairah dan motivasi guru mengajar; dan b) kelengkapan sarana dan prasarana dapat memberikan berbagai pilihan pada peserta didik untuk belajar.

4. Faktor Lingkungan

Dilihat dari dimensi lingkungan ada dua faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu faktor organisasi kelas dan faktor iklim sosial-psikologis. Faktor organisasi kelas yang di dalamnya meliputi jumlah peserta didik dalam satu kelas merupakan aspek penting yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Organisasi kelas yang terlalu besar akan kurang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Iklim sosial-psikologis secara internal adalah hubungan antara orang yang terlibat dalam lingkungan sekolah, misalnya iklim sosial antara peserta didik dengan siswa; antara peserta didik dengan guru; antara guru dan guru bahkan guru dengan pimpinan sekolah. Iklim-psikologis eksternal adalah keharmonisan hubungan antara pihak sekolah dengan dunia luar; misalnya sekolah dengan orang tua siswa, hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga masyarakat dan lain sebagainya.

Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai fundamental Islam, di mana setiap muslim terlepas dari disiplin ilmu apapun yang akan dikaji. Namun, persoalan yang kemudian muncul adalah praktek dan realita sosial yang terjadi di Indonesia, sering kali menjadi tolok ukur berhasil atau tidaknya suatu pendidikan agama Islam di sekolah.

Buruknya kehidupan sosial di Indonesia ditandai dengan praktek hidup korup, tingginya penggunaan narkoba serta kehidupan yang materialistik menjadikan pendidikan agama Islam disekolah sebagai pihak yang memikul tanggung jawab. Oleh karena itu perlu adanya revitalisasi pendidikan agama Islam yang melibatkan semua pihak yang terkait baik orang tua, guru, maupun masyarakat, perlu mengkaji proses dan struktur terbentuk aspek afektif dalam proses pembelajaran agama Islam. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka revitalisasi pendidikan agama Islam antara lain: Melakukan penilaian pencapaian belajar yang berorientasi pada aspek afektif tidak hanya terpusat pada kognitifnya saja.

- a) Mengubah cara pandang terhadap kurikulum pendidikan agama Islam.
- b) Adanya pendekatan yang bersifat values clarification dalam pembelajaran pendidikan agama Islam.
- c) Mengubah strategi pembelajaran dari model pembelajaran tradisional menjadi model pembelajaran yang inovatif serta menyenangkan
- d) Adanya kerja sama antara guru, kepala sekolah, masyarakat dan keluarga dalam memperhatikan perkembangan sikap anak.
- e) Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap di sekolah

Dengan demikian dalam tataran praksis bahwa kurikulum sebagai hasil

belajar dan sebagai pembelajaran. Pembelajaran agama Islam bukan sekedar kurikulum tertulis yang hanya disampaikan sebagai pengetahuan (kognitif) saja. Tetapi kurikulum PAI mampu memberikan nilai terhadap peserta didik dengan pemahaman, perilaku, sikap terhadap materi yang ada.²²

Di dalam GBPP mata pelajaran pendidikan Agama Islam kurikulum 1994 pada dasarnya mencakup tujuh unsur pokok yaitu, al-Qur'an dan al-Hadits, Keimanan atau Aqidah, Akhlak, Fiqh (hukum Islam), dan Tarikh (sejarah) yang menekankan pada perkembangan politik. Pada kurikulum tahun 1999 dipadatkan menjadi lima unsur pokok, yaitu al-Qur'an, Aqidah, Akhlak, Fiqh, dan bimbingan ibadah serta Tarikh atau sejarah yang lebih menekankan pada perkembangan ajaran agama, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.²³ Meskipun masing-masing aspek tersebut dalam praktiknya saling terkait (mengisi dan melengkapi), tetapi jika dilihat secara teoritis masing-masing memiliki karakteristik sendiri. Aspek al-Qur'an-Hadis, menekankan pada kemampuan baca tulis yang benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Aspek Aqidah, menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan atau keimanan yang benar serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai al-asma' al-Husna. Aspek Akhlak, menekankan pada pembiasaan untuk melaksanakan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Aspek Fiqh, menekankan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik. Sedangkan aspek Tarikh dan kebudayaan Islam.

C. Hambatan dan Solusi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

1. Hambatan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Umum

Penilaian secara moderat, pendidikan agama Islam di sekolah umum berhasil, tetapi dalam beberapa hal masih mengalami hambatan dan rintangan. Di antara keberhasilannya itu; *pertama*, dengan dilakukan program pendidikan agama Islam di sekolah umum, dilihat dari perspektif cita-cita pendidikan nasional, usaha Departemen Agama dalam membina pendidikan agama di sekolah umum telah berhasil mewujudkan cita-cita konvergensi. Para peserta didiksekolah umum mengenal dan mempelajari agama di sekolahnya masing-masing selain pelajaran-pelajaran umum. *Kedua*, sekolah sepenuhnya tidak bersifat sekuler, karena peserta didik

²² Lihat Abdul, Majid dkk.. Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, dalam jurnal el HiKMAH Jurnal Kajian Islam dan Penelitian Pendidikan Islam Vol. 12. No 2, 2018 (Bandung: Remaja Rosdakarya 2005) 145 dan 151

²³ Lihat Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam; di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi.(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.), h. 259.

belajar agama dan mengamalkannya. *Ketiga*, di sisi lain, madrasah dan sekolah-sekolah agama tidak lagi menganggap ilmu-ilmu umum hal yang bersifat dunia yang diharamkan untuk dipelajari, sekarang ilmu-ilmu umum dipelajari oleh siswa-peserta didikmadrasah dan sekolah agama.²⁴

Untuk mengukur keberhasilan peserta didiksetelah mempelajari pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), peserta didik diharapkan memiliki sembilan indikator, yaitu:²⁵

1. Peserta didik memiliki pengetahuan fungsional tentang agama Islam dan mengamalkannya.
2. Peserta didik meyakini kebenaran ajaran agama Islam dan menghormati orang lain meyakini agamanya pula.
3. Peserta didik bergairah dalam beribadah.
4. Siswa terbiasa membaca kitab suci al-Qur'an dan berusahamemahaminya.
5. Peserta didik memiliki sifat kepribadian muslim (berakhlak mulia).
6. Peserta didik rajin belajar, giat belajar dan gemar berbuat baik.
7. Peserta didik mampu mensyukuri nikmat Allah SWT.
8. Peserta didik memahami, menghayati dan mengambil manfaat dari tarikh Islam.
9. Peserta didik mampu menciptakan suasana kerukunan hidup beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Mochtar Buchori menilai pendidikan agama masih gagal. Kegagalan ini disebabkan karena praktik pendidikannya hanya memperhatikan aspek kognitif semata dari pertumbuhan kesadaran nilai-nilai (agama), dan mengabaikan pembinaan aspek afektif dan *konotif-volitif*, yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Akibatnya terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan pengamalan, antara gnosis dan praxis dalam kehidupan nilai agama. Atau dalam praktik pendidikan agama berubah menjadi pengajaran agama, sehingga tidak mampu membentuk pribadi-pribadi bermoral, padahal intisari dari pendidikan agama adalah pendidikan moral.

Muhaimim menuliskan indikator-indikator kelemahan pelaksanaan PAI di sekolah-sekolah:²⁶

- a) PAI kurang bisa mengubah pengetahuan Agama yang kognitif menjadi makna dan nilai atau kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai

²⁴ Muhaimin. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam; di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi, h. xxxiii.

²⁵ Departemen Agama RI. 2003. Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas. Depag RI: Dirjen Kelembagaan Agama Islam. 2003), h. 5-8.

²⁶ Muhaimin. Nuansa Baru Pendidikan Islam. (Jakarta: Raja Grafindo 2006.), h. 37.

- keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik.
- b) PAI kurang dapat berjalan bersama dan bekerja sama dengan program-program pendidikan non-agama.
 - c) PAI kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial budaya atau bersifat statis kontekstual dan lepas dari sejarah, sehingga Peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.

Selanjutnya Ahmad Tafsir menyebutkan 12 kelemahan PAI di sekolah:²⁷

- a. Kurangnya dukungan orang tua murid
- b. PAI kurang diminati
- c. Kurikulum PAI terlalu luas
- d. Pelajaran agama kurang berguna bagi kehidupan material
- e. Tidak di UN-kan
- f. Kurang Peneladanan dari guru
- g. Kurangnya Pembiasaan dari sekolah
- h. Penampilan guru agama kurang menarik
- i. Budaya Global
- j. Spiritualisme melawan Materialisme
- k. PAI tidak menyatu dalam sistem
- l. PAI tidak menjadi fokus dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai kritik atas kelemahan dari pelaksanaan pendidikan agama lebih banyak bermuara pada aspek metodologi pembelajaran PAI dan orientasinya yang lebih bersifat normatif, teoritis dan kognitif, serta kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat atau kurang ilustrasi konteks sosial budaya dan bersifat statis tidak kontekstual serta lepas dari sejarah, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian dan lain-lain. Aspek yang disoroti adalah menyangkut muatan kurikulum atau materi pendidikan agama, sarana pendidikan agama, termasuk di dalamnya buku-buku dan bahan-bahan ajar pendidikan agama.

2. Solusi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

Salah satu masalah yang dihadapi pengajaran agama Islam di sekolah adalah adanya kekurangan jam pelajaran agama Islam yang disediakan di sekolah-sekolah. Dengan demikian diperlukan pendekatan pembelajaran PAI yang dapat menumbuhkan karakter siswa, Pada dasarnya karakter ini lebih

²⁷ Lihat Tafsir, Ahmad..Penelitian Pada Pendidikan Agama Islam, (Studium General, Program Magister PAI UIN Jakarta , 6 November 2013), h. 184.

bermuatan aspek afektif. Dengan mengacu taksonomi pembelajaran menurut Benyamin. S. Bloom cakupan domain afektif terdiri dari;

- a. Penerimaan (*Receiving*)
- b. Sambutan (*Responding*)
- c. Penilaian (*Valuing*)
- d. Pengorganisasian (*Organization*)
- e. Karakterisasi (*Characterazation*)

Dengan Kerangka Pikir ini, Abudin Nata menawarkan pendekatan pembelajaran PAI dalam rangka menumbuhkan kembangkan potensi bagi peserta didik:²⁸

1. *Modeling-Imitating*: pendekatan pembelajaran PAI dengan menghadirkan perilaku yang baik dipraktikkan di lingkungan sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua sebagai contoh dan model di mana peserta didik dapat melihat, mengamati, mempraktikkan perilaku yang baik bagi mereka. Dengan pemberian contoh yang baik, *Uswatun Hasanah* atau *Qudwah Hasanah*, menguatkan materi yang dipelajari peserta didik di kelas.
2. Materi PAI tidak sebatas materi belaka yang sifatnya abstrak, tetapi peserta didik mendapat pembuktian secara praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dengan apa yang dilihatnya dari orang-orang di sekitarnya semakin memberi keinginan untuk mempraktikkan materi-materi yang telah dipelajarinya.
3. *Reflecting*: Pendekatan yang bertujuan, peserta didik mampu mendapatkan sebuah pantulan atau masukan dengan apa yang telah dipelajarinya. Materi yang dipelajari tidak begitu saja lewat dilupakan tanpa meninggalkan bekas apa-apa yang bermanfaat setelah itu. Berefleksi berarti mencoba menilai perbuatan diri sendiri. Apakah proses pembelajaran yang dilakukannya sudah memberi suatu hal positif bagi dirinya. Dalam refleksinya, ternyata materi-materi PAI yang telah dipelajarinya, mengandung nilai-nilai universal, komprehensif, serta aplikatif yang berguna bagi kesuksesan hidupnya di dunia maupun di akhirat.
4. *Problem Solving*: pendekatan dengan melibatkan peserta didik dari setiap pembelajaran PAI. Guru tidak lagi sebagai satu- satunya sumber ilmu terhadap sebuah masalah. Objek materi yang dipelajari sebagai sebuah masalah yang harus dipecahkan dan dicarikan solusi. Dari sini timbul pemahaman terhadap sebuah masalah, masing-masing peserta didikan memiliki pendapat yang berbeda dan bermacam-macam. Keikut

²⁸ Nata, Abuddin.. Manajemen pendidikan: Mengatasi Kelemahan pendidikan Islam di Indonesia. (Jakarta: Prenada Kencana. 2003), h. 31.

partisipasian semua peserta didik dalam memecahkan sebuah masalah, kemudian dirumuskan jalan solusinya, secara tidak langsung menuntut tanggung jawab atas semua hal yang telah mereka lalui.

5. *Deep Discussion*: pendekatan pembelajaran PAI yang menuntun masing-masing peserta didik berdiskusi secara mendalam, analisis, kritis terhadap pemahaman ajaran Islam. Dari sini, Islam sebagai sebuah horizon ilmu pengetahuan yang ilmiah dan komprehensif. Pemahaman menggali kembali dari sumber ajaran al-Qur'an dan hadits, membaca pendapat para ulama, serta melihat hasil-hasil penemuan ilmiah terkini. Pemahaman peserta didik terhadap Islam yang dibangun, bereferensi yang otoritatif argumentasi yang rasional dan empirikal, serta memberi kemaslahatan bagi semesta.
6. *Socialization*: pendekatan pembelajaran PAI sebagai suatu proses implementasi yang dialami bagaimana sebuah ajaran atau nilai (PAI) bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada pertentangan. PAI sebagai sebuah materi penuh nilai, untuk bisa menjadi sebuah karakter yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, ada tahapan dan proses yang harus dilalui. Dimulai dari adaptasi, proses penyesuaian terhadap sesuatu hal yang baru (nilai PAI) dengan lingkungan sekitar, kemudian terjadi asimilasi yaitu saling pengaruh mempengaruhi antar yang sudah ada (lingkungan sekitar) dengan yang baru, kemudian terjadi kolaborasi, kedua unsur yang sudah ada dan baru bisa saling kerjasama sehingga selanjutnya terjadi Integrasi, yakni pembaruan yang masuk di antara kedua unsur (nilai PAI dan lingkungan sekitar) dengan lancar dan saling mengisi.
7. *Autentik Assasment*: pendekatan pembelajaran PAI dengan penilaian dan evaluasi yang terus menerus berkesinambungan dan berkelanjutan terhadap anak didiknya. Tindakan ini menuntut guru mampu melakukan penilaian secara observasi perilaku keseharian anak didiknya. Perilaku-perilaku keseharian peserta didik inilah sebagai informasi yang paling berharga dari pembelajaran PAI sendiri, terbiasanya peserta didik melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia yang dituntut dari PAI. Selanjutnya, perilaku mulia ini menjadi karakter bagi siswa. Cara penilaian dapat dilakukan dengan portopolio ataupun *diary book* siswa.

Pelaksanaan pendidikan Agama Islam di sekolah, banyak sekali muncul problematika-problematika. Berbagai problematika yang muncul, bisa berkenaan dengan masalah yang bersifat internal, maupun eksternal. Faktor Internal sekolah, misalnya guru yang belum berkompeten, maupun sarana-prasarana yang tidak mendukung. Sedangkan permasalahan dari eksternal,

bisa datang dari kurangnya dukungan masyarakat (Orang Tua murid), ataupun kurangnya dukungan dari pemerintah daerah setempat. Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran sesuai tujuan yang ditetapkan diperlukan pembelajaran yang efektif dan bermakna, sebab selama ini proses pembelajaran dirasakan belum memiliki makna yang berarti kepada peserta didik. Ada beberapa metode dan strategi pembelajaran yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran Agama Islam di sekolah di antaranya:

1. *Student Centered Instruction*, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti diskusi dalam berbagai variasi, demonstrasi dan games. Dituntut peran aktif siswa, dan guru sebagai fasilitator
2. *Collaborative Learning*, yaitu pembelajaran aktif di mana peserta didik dan guru berkolaborasi atau dengan warga sekolah lainnya.
3. *Cooperative learning*, yaitu proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik terlibat langsung dalam pembelajaran secara berkelompok dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru.
4. *Self discovery learning*, yaitu belajar melalui penemuan mereka sendiri, melalui observasi dan pengamatan terhadap masalah yang harus mereka pecahkan.
5. *Quantum learning*, yaitu strategi pembelajaran yang melibatkan seluruh komponen diri siswa, dengan pendekatan individu dan kelompok.
6. *Contextual Teaching and Learning (CTL)*, yaitu strategi yang digunakan untuk membantu peserta didik untuk memahami makna dan materi pelajaran dengan mengaitkan mata pelajaran tersebut dengan konteks kehidupan mereka.

Selain dengan pemilihan dan penggunaan strategi pembelajaran yang tepat dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam sebagai implementasi kurikulum PAI, ada beberapa hal terkait dengan implementasi tersebut.

Pertama, keteladanan, merupakan upaya konkrit dalam menanamkan nilai-nilai luhur pendidikan Agama Islam kepada peserta didik. Secara psikologis anak memang senang meniru; tidak saja yang baik, tetapi juga yang tidak baik. Perilaku yang ditiru peserta didikan terus melekat sehingga akan menjadi karakter dalam dirinya. Mengingat pentingnya keteladanan, maka menurut Zakiah Darajat menyebutkan untuk menjadi seorang guru harus memenuhi syarat: bertakwa kepada Allah, berilmu, sehat jasmani dan rohani, dan berkelakuan baik. Guru harus menjadi tauladan bagi peserta didik dan lingkungannya.²⁹

²⁹ Darajat, Zakiah.. Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara 2000), h, 41-44

Kedua, tugas pendidikan Agama Islam, bukanlah sepenuhnya tanggung jawab sekolah/madrasah dalam hal ini guru Agama Islam, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan lingkungan masyarakat. Tidak sedikit anak yang mendapat pendidikan Agama Islam yang baik di sekolah, tetapi karena di rumah atau lingkungannya tidak pernah ditanamkan nilai-nilai religiusitas yang baik, maka anak tersebut menjadi rusak. Oleh karena itu peranan keluarga dan masyarakat terhadap penanaman nilai-nilai pendidikan Agama Islam terhadap anak sangat dibutuhkan.

Ketiga, pentingnya evaluasi, evaluasi bukan hanya dilakukan di sekolah/madrasah secara formal baik formatif maupun sumatif. Lebih dari itu, evaluasi yang dilakukan oleh lingkungan sosial masyarakat sangatlah penting. Jika di sekolah peserta didik dinilai lebih pada nilai akademis, namun di masyarakat, peserta didik dinilai akan kesalehan pribadinya yang tercermin dari sikap dan prilakunya (akhlaq).

Abuddin Nata menawarkan solusi untuk mengatasinya. *Pertama*, dengan merubah orientasi dan fokus pengajaran agama yang semula bersifat *subject matter oriented*, yakni dari semula yang berpusat pada pemberian pengetahuan agama dalam arti memahami dan menghafal ajaran agama sesuai kurikulum, menjadi pengajaran agama yang berorientasi pada pengamalan dan pembentuk sikap keagamaan melalui pembiasaan hidup sesuai dengan agama. *Kedua*, dengan cara menambah jam pelajaran agama yang diberikan di luar jam pelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Penambahannya itu dengan bentuk ekstrakurikuler dengan kegiatan shalat berjama'ah, pendalaman agama melalui pesantren kilat, qiyamul lail, berpuasa sunah, memberikan santunan kepada fakir miskin, kegiatan sosial keagamaan lainnya. *Ketiga*, dengan cara meningkatkan perhatian, kasih sayang, bimbingan, dan pengawasan yang diberikan oleh kedua orang tua di rumah. *Keempat*, melaksanakan tradisi keislaman yang didasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah yang disertai dengan pengahayatan akan makna dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. *Kelima*, pembinaan sikap keagamaan tersebut dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media masa yang tersedia, seperti radio, surat kabar, buku bacaan, televisi dan lain sebagainya.

PENUTUP

Dari uraian materi di atas yang menjadi kesimpulan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Materi pendidikan agama Islam mendapatkan diskriminatif khususnya sekolah negeri maka perlu maka tim penyelidik dalam mengis

- kemerdekaan mengusulkan beberapa hal yaitu: a) Pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah; b) Para guru dibayar oleh pemerintah; c) Pada Sekolah Dasar, pendidikan agama diberikan mulai kelas IV; d) Pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu; e) Para guru agama diangkat oleh Departemen Agama, para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum; f) Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama; h) Diadakan latihan bagi para guru agama; dan i) Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki, dan (j) Pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan.
2. Kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah terdiri dari beberapa aspek yaitu, aspek al-Qur'an Hadits, Keimanan atau Aqidah, Akhlak, Fiqh (Hukum Islam), dan aspek Tarikh (Sejarah). Pendidikan Islam pada dasarnya bertujuan untuk mengantarkan peserta didik agar memiliki kemantapan akidah dan kedalaman spiritual.
 3. Kelemahan dan Solusi pendidikan agama Islam di sekolah umum di antaranya:
 - A. Kelemahan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum: a) Kurangnya dukungan orang tua murid; b) PAI kurang diminati; c) Kurikulum PAI terlalu luas; d) Pelajaran agama kurang berguna bagi kehidupan material; e) Kurang Peneladanan dari guru; f) Kurangnya Pembiasaan dari sekolah; g) Penampilan guru agama kurang menarik; h) Budaya Global; i) Spiritualisme melawan Materialisme; j) PAI tidak menyatu dalam sistem; dan k) PAI tidak menjadi fokus dalam kehidupan sehari-hari.
 - B. Solusi PAI di sekolah umum ; 1) Modeling-Imitating: pendekatan pembelajaran PAI dengan menghadirkan perilaku yang baik dipraktikkan di lingkungan sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua; 2) Materi PAI tidak sebatas materi belaka yang sifatnya abstrak, tetapi peserta didik mendapat pembuktian secara praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari; 3) Reflecting: Pendekatan yang bertujuan, peserta didik mampu mendapatkan sebuah pantulan atau masukan dengan apa yang telah dipelajarinya; 4) Problem Solving: pendekatan dengan melibatkan peserta didik dari setiap pembelajaran PAI; 5) Deep Discussion: pendekatan pembelajaran PAI yang menuntun masing-masing peserta didik berdiskusi secara mendalam, analisis, kritis terhadap pemahaman ajaran Islam; 6) Socialization: pendekatan pembelajaran PAI sebagai suatu proses implementasi yang dialami bagaimana sebuah ajaran atau nilai (PAI) bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada pertentangan; dan 7) Autentik Assasment: pendekatan pembelajaran PAI dengan penilaian dan

evaluasi yang terus menerus berkesinambungan dan berkelanjutan terhadap anak didiknya. Tindakan ini menuntut guru mampu melakukan penilaian secara observasi perilaku keseharian anak didiknya. Perilaku-perilaku keseharian peserta didikinilah sebagai informasi yang paling berharga dari pembelajaran PAI sendiri, terbiasanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf Abd. Rachman. Politik Pendidikan Nasional; Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005
- Azrah, Azyumardi. APendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Melenium III Cet. I; Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2012.
- Darajat, Zakiah.. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara 2000.
- Daulay, Haidar Putra. Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Departemen Agama RI. 2003. Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas. Depag RI: Dirjen Kelembagaan Agama Islam. 2003.
- F.X. Soeyarno, Wasty Soemanto. Landasan Historis Pendidikan Indonesia Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Gunawan, Ary H. Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Hamalik, Oemar. Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Madjid, Nurcholish. Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan Jakarta: Paramadina, 1997.
- Makawimbang, Jerry H. Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan Cet. I; Bandung: Alfabeta, 20011.
- Malik, dkk Abdul. Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam; di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005..
- Muhaimin. Nuansa Baru Pendidikan Islam. Jakarta: Raja Grafindo 2006.
- Muhaimin. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam; di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Nasution, S. Sejarah Pendidikan Nasional Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

- Nata, Abuddin. Manajemen pendidikan: Mengatasi Kelemahan pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Kencana. 2003.
- Noer, Deliar. Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1988.
- Rahim. Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia, Assegaf, Politik Pendidikan Nasional.
- Rahim, Husni. Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia Jakarta: Logos, 2001.
- Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia. 2004.
- Steenbrink, Karel A. Pesantren Sekolah dan Madrasah; Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen Jakarta: LP3ES, 1994.
- Tafsir, Ahmad. Penelitian Pada Pendidikan Agama Islam, Studium General, Program Magister PAI UIN Jakarta, 6 November 2013.
- Yunus, Mahmud. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.
- Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam Jakarta: Bumi Aksara, 1997.